

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2011). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2011). Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang

dan jasa) atau PDB yang terus-menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang lambat atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Menurut Sukirno, (2008) pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya Sukirno, (2008) membagi pengangguran menjadi 4 bagian yaitu pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, setengah pengangguran dan pengangguran musiman. Berbeda dengan jenis pengangguran lainnya, pengangguran terbuka merupakan keadaan yang paling mengkhawatirkan karena pada jenis ini seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan meskipun sedang mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Badan Pusat Statistika, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia terus mengalami peningkatan dan penurunan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, sepertipada tahun 2010 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia adalah sebesar 8.319.779 orang yang kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 8.681.392 orang. Kemudian pada

tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 7.344.866 orang, meningkat kembali pada tahun 2013 yaitu menjadi 7.410.931 orang. Penurunan jumlah pengangguran terbuka terjadi kembali pada tahun 2014 menjadi 7.244.905 orang, lalu pada tahun selanjutnya yaitu 2015 meningkat menjadi 7.560.822 orang. Dua tahun selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan jumlah pengangguran yaitu menjadi 7.031.775 orang dan 7.005.262 orang. Lebih rinci perhatikan tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Jumlah Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Indonesia Tahun 2010 – 2017 Periode Bulan Agustus (Orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak/belum pernah sekolah	157.586	205.388	85.374	81.432	74.898	55.554	59.346	62.984
Tidak/belum tamat SD	600.221	737.610	512.041	489.152	389.550	371.542	384.069	404.435
SD	1.402.858	1.241.882	1.452.047	1.347.555	1.229.652	1.004.961	1.035.731	904.561
SLTP	1.661.449	2.138.864	1.714.776	1.689.643	1.566.838	1.373.919	1.292.483	1.274.417
SLTA Umum/SMU	2.149.123	2.376.254	1.867.755	1.925.660	1.962.786	2.280.029	1.950.626	1.910.829
SLTA Kejuruan/SMK	1.195.192	1.161.362	1.067.009	1.258.201	1.332.521	1.569.690	1.520.549	1.621.402
Akademi/Diploma	443.222	276.816	200.028	185.103	193.517	251.541	219.736	242.937
Universitas	710.128	543.216	445.836	434.185	495.143	653.586	567.235	618.758
Total	8.319.779	8.681.392	7.344.866	7.410.931	7.244.905	7.560.822	7.031.775	7.005.262

Sumber: Badan Pusat Statistika, (2019)

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan SLTA SMK/Kejuruan pada tahun 2010 sebanyak 1.195.192 orang, lalu pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penuruan menjadi 1.161.362 dan 1.067.009 orang. Namun pada tahun selanjutnya dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan pengangguran terbuka yaitu menjadi 1.258.201 orang, 1.332.521 orang dan 1.569.690 orang. Kemudian, di tahun selanjutnya tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.520.549 orang dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 1.621.402 orang.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan–lulusan yang siap bekerja dengan mengutamakan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan jurusannya. Menurut Sukmadinata (2012), pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang produktif, yakni manusia kerja, bukan manusia beban bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. SMK merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan keterampilan siswa. Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari pendidikan pada umumnya. Karakteristik dipersepsikan pada hubungannya dengan parameter potensial yang menjadi kontrol terhadap tujuan penyiapan individu, yang berdaya guna dan memiliki manfaat lebih sebagai tenaga kerja.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekolah kejuruan merupakan sekolah untuk mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, masyarakat bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut hendaknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus berorientasi kepada dunia kerja, yakni dapat mengembangkan tenaga kerja yang marketable (orientasi pada pasar kerja), dengan mengembangkan kemampuan untuk melakukan keterampilan-keterampilan yang memberikan kemanfaatannya sebagai alat produksi.

Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja bangsa Indonesia terus meningkat namun lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu dan belum tersedia untuk menampung peningkatan angkatan kerja tersebut. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi

pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi.

Selain itu permasalahan penetapan upah minimum juga dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung pada tingkat pengangguran. Menurut Mankiw, (2000) upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah haruslah sesuai dengan standar kelayakan hidup karena dalam penetapan tingkat upah dapat memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran. Semakin besar tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah memungkinkan semakin besar tingkat pengangguran yang ada. Hal tersebut dikarenakan perusahaan harus menekan biaya produksi.

Menurut Gilarso, (2003) upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah/gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2001 dalam Sukmaraga, 2011). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber

penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001).

Selain PDRB, inflasi yang dialami suatu negara juga menjadi salah satu bagian yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat dan jumlah pengangguran. Menurut Nanga, (2005) inflasi adalah salah satu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin rendah nilai uang terhadap barang dan jasa. Rendahnya nilai rupiah terhadap barang dan jasa mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian barang impor yang relatif lebih murah, hal ini mengakibatkan daya saing sektor riil dan sektor industri di Indonesia melemah sehingga mengakibatkan akan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya.

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Sektor industri ini dapat menjadi motor penggerak (*leading sector*) dalam membangun ekonomi. Hal tersebut mendorong para investor untuk berinvestasi di sektor industri, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Dengan adanya peningkatan investasi sektor industri ini dapat membantu menyerap tenaga kerja dan akibatnya tingkat pengangguran akan mengalami penurunan. Seperti menurut Kurniawan (dalam Prayuda, 2015) semakin tinggi tingkat investasi, tingkat pengangguran akan menurun. Menurut Satrio (dalam Zulhanafi, 2013) peningkatan investasi akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran akan menurun.

Pentingnya analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran karena pengangguran akan menimbulkan beberapa dampak signifikan terhadap suatu Negara seperti masyarakat yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya disebabkan oleh pendapatan nasional yang di peroleh lebih rendah daripada pendapatan nasional potensial suatu

pemerintahan. Selain itu semakin tinggi tingkat pengangguran suatu Negara maka semakin berkurang pula penadapatan pajak Negaratersebut (Zarkasyi, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu dianalisis hubungan jumlah angkatan kerja, tingkat inflasi, besaran upah minimum yang diterima pekerja yang berlaku, dan PDRB terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian yang terkait dengan latar belakang masalah sebelumnya, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum yang ditetapkan pemerintah terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia?
5. Bagaimana investasi pada sektor industri berpengaruh terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta perumusan masalah, dapatditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap kenaikan jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh naik besaran upah minimum yang ditetapkan pemerintah terhadap kenaikan jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh besarnya PDRB terhadap kenaikan jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh investasi pada sektor industri terhadap jumlah pengangguran SMK/Kejuruan di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca. Adapun manfaat dan kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan memberikan informasi tentang jumlah pengangguran di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ekonomi yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
3. Memberikan informasi kepada pemerintah tentang kebijakan yang dikeluarkan dalam penetapan upah minimum di setiap provinsi yang berdampak terhadap pengangguran.